

STRATEGI SATUAN BRAVO 90 PASUKAN KHAS DALAM MENGATASI TERORISME SEBAGAI IMPLEMENTASI TUGAS OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) TENTARA NASIONAL INDONESIA

BRAVO 90 PASKHAS UNIT STRATEGY IN OVERCOMING TERRORISM AS IMPLEMENTATION MILITARY OPERATION OTHER THAN WAR OF INDONESIA ARMED FORCES

Saudi Firmansyah Putra¹, Yusuf², Deden Koswara³

PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS/ FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN/
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Saudi.firmansyah@gmail.com

Abstrak – Terorisme bersifat membahayakan ideologi negara sehingga menjadi penghalang tercapainya tujuan pertahanan negara. Salah satu titik kerentanan dalam serangan aksi terorisme adalah aspek udara yang mana terjadi penyerangan melalui wahana udara terhadap obyek vital memiliki akurasi target yang sangat tinggi. Melihat wilayah kedaulatan udara Indonesia yang sangat luas, diperlukan pertahanan yang kuat khususnya terkait terorisme. Pasukan khusus anti teror aspek udara yang dimiliki TNI adalah Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU (Satbravo 90 Paskhas) yang digunakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI diantaranya penanggulangan terorisme. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi tugas OMSP TNI dalam mengatasi terorisme dan menganalisis strategi Satbravo 90 Paskhas dalam mengatasi terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Analisa dilakukan menggunakan teori strategi, konsep interoperabilitas, konsep implementasi, konsep counter terrorism dan konsep OMSP. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, implementasi tugas OMSP TNI, Satbravo 90 Paskhas telah menjalankan tiga indikator dalam implementasinya yaitu interpretasi, penggunaan sumber daya, dan penyampaian kebijakan. Kedua, strategi Satbravo 90 Paskhas terdiri dari *Ends* untuk menjadi satuan penanggulangan anti teror yang profesional dan tangguh dalam mengatasi terorisme aspek udara di Indonesia, *Means* yaitu dengan penggunaan kualitas sumber daya manusia serta alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki yang dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan ancaman teror terkini yang berfokus pada aspek udara, Serta *Ways* yang digunakan dengan cara berkoordinasi ke satuan penanggulangan teror dari matra lainnya.

Kata Kunci: Anti-teror, Implementasi, OMSP, Satbravo 90 Paskhas, Strategi

Abstract – Terrorism is a threat to state security and becomes an obstacle for the government to achieve national defense goals. The terrorists that have very high target accuracy on the state's vital objects becoming one of the points of vulnerability. Considering Indonesia's vast airspace, a strong defense is needed, especially in dealing with terrorism. The Bravo 90 Paskhas TNI AU (Satbravo 90 Paskhas) was used to carry out the Military Operations Other Than War (OMSP) tasks, including counter-terrorism. The purpose of this study is to analyze the implementation of TNI OMSP's and the Satbravo 90 Paskhas strategy tasks in counter-terrorism. This study uses qualitative research

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

methods with a phenomenological approach. The analysis uses the theory of strategy, the concept of interoperability, the concept of implementation, the concept of counter-terrorism, and the concept of OMSP. The results of this study are first, the Satbravo 90 Paskhas has implemented three indicators as part of OMSP, namely interpretation, usage of resources, and delivery of policies. Second, the Satbravo 90 Paskhas strategy has a goal to become a professional and tough anti-terror countermeasure unit in the airspace aspect in Indonesia. Improving the quality of human resources with defense and security equipment that can be operated properly following the latest terror threats that focus on the air aspect and maintaining coordination with the other terror prevention units.

Keywords: Anti-terror, Implementation, OMSP, Satbravo 90 Paskhas, Strategy

Pendahuluan

Terorisme bersifat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu. Ancaman tersebut dapat menjadi penghalang tercapainya tujuan negara dan tujuan pertahanan negara.⁴ Sesuai dengan pasal 4 UU No.3 tahun 2002 dijelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.⁵ Dikarenakan merupakan kejahatan luar biasa, maka pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana,

terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No 5 Tahun 2018)⁶.

Hal yang tidak luput dalam sejarah terorisme global juga berawal dari serangan pembajakan pesawat udara yang dilakukan oleh Al-Qaeda untuk menyerang gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa kedaulatan udara berperan sangat penting untuk menghadapi aksi terorisme udara.⁷ Sejak tahun 2001 dikala peristiwa 9/11 terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa yang memakan ribuan korban nyawa dan kerugian miliaran dolar itu disebut sebagai “*United States Under Attack*”, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai “*The Second Pearl Harbor*”. Peristiwa fatal yang terjadi

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁶ Op.Cit. UU Nomor 5 Tahun 2018

⁷ Omer Aziz, “The World 9/11 Took From Us”, <https://www.nytimes.com/2019/09/11/opinion/sep-tember11-attacks-2001.html>, 11 September 2019, diakses pada 1 Oktober 2019

sebagai akibat kelalaian dalam menjaga wilayah udara kedaulatan negara dalam pengendalian dan pengawasan yang ketat.⁸

Dewasa ini aksi terorisme terus mengalami pergeseran baik dalam bentuk perekrutannya maupun strategi taktis penyerangan. Organisasi-organisasi teroris masih memanfaatkan era keterbukaan untuk mendapatkan informasi dan saling bekerja sama secara internal antara satu organisasi teroris dan yang lainnya. Peluang tersebut masih dipergunakan oleh organisasi-organisasi teroris untuk mengamankan akses secara geografi dan untuk mendapatkan persenjataan serta dukungan finansial dan tempat-tempat berlindung. Perubahan aksi terorisme juga ditandai dengan aksi penyerangan dan perlawanan bersenjata terhadap personil dan markas aparat keamanan, bahkan terdapat indikasi yang kuat adanya ancaman aksi terorisme terhadap pejabat negara dan objek vital strategis nasional.⁹

Salah satu titik kerentanan dalam serangan aksi terorisme ialah pada aspek udara. Hal ini dibuktikan dengan adanya

penyerangan melalui *drone*, pembajakan pesawat udara, dan pembomban objek vital udara (Bandar Udara). Salah satu peristiwa terkini ialah serangan *drone* oleh kelompok teroris terhadap kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Hal tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2019 pukul 04.00 pagi, pihak keamanan pabrik Aramco berusaha memadamkan kebakaran di dua fasilitas perusahaan di Abqaiq dan Khurais sebagai dampak dari serangan udara *drone*.¹⁰

Selain itu, terorisme di udara juga pernah terjadi di Asia Tenggara khususnya Indonesia, peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla pada tanggal 28 Maret 1981.¹¹ Pembajakan terjadi dalam perjalanan dari Palembang ke Medan, tiba-tiba 5 anggota kelompok ekstremis 'Komando Jihad' yang menyamar sebagai penumpang beraksi dengan senjata api, mereka meminta pilot untuk menerbangkan pesawat ke Kolombo, Srilanka dan berakhir di Thailand. Pembajakan pesawat DC-9 ini ditanggulangi oleh Pasukan Elit TNI Kopassanda yang kini disebut dengan

⁸ Chappy Hakim, Hakim, C. "Kedaulatan Negara Di Udara-Krisis Nasionalisme", <http://www.chappyhakim.com/kedaulatan-negara-di-udara-krisis-nasionalisme/>, 23 September 2019, diakses pada 1 Oktober 2019

⁹ Kementerian Pertahanan Indonesia, Buku Strategi Pertahanan, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015), hlm. 22

¹⁰ David Reid, "Saudi Aramco Reveals Attack Damage at Oil Production Plants", <https://www.cnn.com/2019/09/20/oil-drone-attack-damage-revealed-at-saudi-aramco-facility.html>, 21 September 2019, diakses pada 1 Oktober 2019

¹¹ Chappy Hakim, *Loc. Cit.*

Satuan 81 Penanggulangan Teror (Sat 81 Gultor) Kopassus.¹²

Ironisnya kini di tahun 2019 ternyata Indonesia masih berhadapan dengan kondisi dimana ada wilayah udara kedaulatannya, di kawasan perbatasan kritis justru berada dalam genggaman otoritas kekuasaan asing. Lebih parah lagi pada sebagian kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah terlarang (*danger area*) yang berarti kawasan berbahaya dan semua pesawat terbang tidak boleh melintas di atasnya, termasuk pesawat terbang Indonesia. Dapat dibayangkan kawasan udara di atas wilayah teritorial Republik Indonesia telah dinyatakan “tertutup” dan berbahaya serta dilarang melintas oleh pihak-negara lain.¹³

Melihat kedaulatan udara Indonesia yang sangat luas, diperlukan pertahanan yang kuat khususnya terkait kasus terorisme. Sehingga pada tanggal 12 Februari 1990 berdasarkan Skep Danpuspaskhas Nomor Skep/03/II/1990 tanggal 12 Februari 1990 tentang Program Khusus Pusat Pasukan Khas TNI Angkatan Udara “Bravo 90” dalam pembinaan Satuan

Kecil Berkualitas Tinggi Paskhasau yang kemudian divalidasi dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Validasi Organisasi Korpaskhas yang mengacu pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/3/IV/2007 Tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Udara.

Konsep pembentukan Detasemen Bravo 90 Paskhas didasari oleh pemikiran resultatif tentang perkembangan teori atau kritisisme (Iptek), data atau empirisisme yang berhubungan dengan sejarah.¹⁴ Meskipun kerentanan ancaman terorisme pada objek vital udara saat ini tidak meningkat di Indonesia, Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU sebagai satu-satunya pasukan anti teror pada aspek udara tetap menjalankan simulasi latihan yang digelar untuk memastikan kesiapan satuan tersebut dalam menanggulangi skenario terorisme. Latihan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang diarahkan guna mendukung komitmen pemerintah dalam hal mencegah dan menanggulangi terorisme.¹⁵

¹² Tanti Yulianingsih, “Pembajakan Pesawat Garuda di Thailand dan Aksi Heroik Pasukan Elite TNI, <https://www.liputan6.com/global/read/3927589/28-3-1981-pembajakan-pesawat-garuda-di-thailand-dan-aksi-heroik-pasukan-elite-tni>, 28 Maret 2019, diakses pada 28 Oktober 2019

¹³ Chappy Hakim, *Loc. Cit.*

¹⁴ Satbravo 90 Paskhas, *Satuan Bravo 90 Paskhas Catya Wihikan Awacya Makapala*, (Jakarta: Satuan Bravo 90 Paskhas, 2018), hlm. 16

¹⁵ Joko Pambudi, “Satuan Bravo’90 Paskhas Simulasi Terorisme di Bandara Husein

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme.¹⁶ Namun, kenyataan saat ini, tidak semua bandar udara disiapkan dengan kesiagaan satuan anti teror khusus untuk menjaga objek vital. Padahal dibelahan negara barat, bandara merupakan salah satu target teroris yang sangat mematikan. Sehingga diperlukan pengamanan khusus untuk objek vital udara.

Salah satu pengamanan khusus tersebut adalah dibentuknya pasukan khusus anti teror. Pasukan yang dimiliki TNI AU adalah Satuan Bravo 90 Paskhas (disingkat Satbravo 90 Paskhas) yang dulunya bernama Detasemen Bravo 90 atau Denbravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus penanggulangan teror yang dilatih secara khusus dan dilengkapi peralatan khusus, serta disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan

penindakan terhadap aksi-aksi teror aspek udara.¹⁷

Namun kenyataannya selama ini, belum seutuhnya peran dan fungsi Satbravo 90 Paskhas diimplementasikan untuk menanggulangi aksi terorisme. Penugasan selama ini adalah pelibatan saja sehingga terkesan hanya sebatas perbantuan kepada Kepolisian, padahal penanganan terorisme pada aspek udara memiliki strategi khusus yang hanya dimiliki oleh Satbravo 90 Paskhas. Sehingga, meskipun tidak terjadi pengemboman pada objek vital udara, akan tetapi lalu lintas teroris melalui sarana udara selama ini kian memprihatinkan. Selain itu, belum adanya strategi khusus penanganan ancaman pada aspek udara mendesak Satbravo 90 Paskhas untuk lebih memainkan peranannya sebagai tugas TNI pada bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Hal ini menegaskan bahwa TNI AU, khususnya Satbravo 90 Paskhas berhak menjalankan tugasnya sebagai pasukan anti teror pada aspek udara. Namun, kenyataan saat ini, pada setiap bandar udara atau objek vital udara lainnya belum secara khusus di persiapkan pasukan anti teror. Padahal TNI juga memiliki personel yang

Sastranegara”, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/05/satuan-bravo-90-paskhas-simulasi-terorisme-di-bandara-husein-sastranegara>, 5 September 2016, diakses pada 1 Oktober 2019

¹⁶ *Op.cit* hlm. 2

¹⁷ Perkasau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Paskhas, pasal 1

menguasai beberapa bidang seperti Psikologi, Pembinaan Mental, Intelijen dan Teritorial, sehingga mampu melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini, identifikasi, resosialisasi, reduksi dalam hal pencegahan dan deradikalisasi, selain itu juga memiliki personel yang berkualifikasi Penanggulangan Teror (Gultor), Raider dan Intai Tempur (Taipur) sehingga mampu melaksanakan tugas penindakan apabila diperlukan.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai Strategi Satuan Bravo 90 Paskhas dalam Mengatasi Terorisme Sebagai Implementasi Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi tugas OMSP TNI pada strategi Satbravo 90 dalam mengatasi terorisme?
- b. Bagaimana strategi Satbravo 90 Paskhas dalam mengatasi terorisme?

Metode Penelitian

¹⁸ TNI-AD, *TOR Akademis FGD Optimalisasi Peran TNI AD Guna Mengatasi Aksi Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional*. (Jakarta: Mabes TNI-AD, 2017)

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas mengenai strategi Satuan Bravo 90 Paskhas dalam mengatasi terorisme adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono yang dikutip dari Creswell menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berarti suatu sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau masalah manusia bilamana proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian, mengumpulkan data dari partisipan, analisis data secara induktif membangun data dan memberikan interpretasi terhadap makna suatu data dan diakhiri dengan membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.¹⁹

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dimana penelitian berawal dari sebuah fenomena yang ingin diteliti dengan cara menanyakan langsung kepada orang-orang yang mengalami suatu peristiwa secara lebih mendalam.²⁰ Tujuannya adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis secara komprehensif mengenai aspek

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 4.

²⁰ Sutiyono, *Fenomenologi Seni Meneropong Fenomena Sosial dalam Kesenian*, (Yogyakarta: Insan Persada, 2011).

kebijakan dan kelembagaan dari lembaga yang menangani kejahatan terorisme ini. Selain itu, penelitian kualitatif berguna untuk mengkaji dan menganalisis serta mengembangkan kerangka konseptual yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun suatu regulasi, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penguatan peran TNI dalam mengatasi terorisme pada umumnya dan Satbravo 90 Paskhas pada khususnya di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep untuk membahas permasalahan dalam rumusan masalah. Adapun teori yang digunakan adalah teori strategi, konsep interoperabilitas, konsep implementasi, konsep kontra terorisme, dan konsep operasi militer selain perang (OMSP).

Hasil dan Pembahasan Implementasi Tugas OMSP TNI pada Strategi Satbravo 90 dalam Mengatasi Terorisme

Dalam membahas implementasi tugas OMSP pada strategi Satbravo 90 Paskhas dalam mengatasi terorisme, peneliti menggunakan konsep implementasi, konsep *counter terrorism*, konsep interoperabilitas, dan konsep OMSP. Dalam konsep implementasi, peneliti menggunakan Syauckani dkk yang menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan dengan cara interpretasi kebijakan, penggunaan sumber daya, dan penyampaian kebijakan.²¹

Secara umum, sesuai dengan konsep diatas terdapat tiga indikator dalam implementasi yang dilakukan oleh Satbravo 90 Paskhas yaitu interpretasi, penggunaan sumber daya, dan penyampaian kebijakan. Pertama, interpretasi yaitu Satbravo 90 Paskhas sudah memiliki aturan lanjutan berupa petunjuk teknis (Juknis) maupun prosedur tetap (Protap) yang di buat sebagai rambu ataupun acuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan Komando Atas.

Kedua, penggunaan sumber daya yaitu penyiapan sumber daya dilakukan dengan latihan rutin, bertahap, bertingkat dan berlanjut termasuk sarana prasarana yang menunjang terus diajukan dan dibangun guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh Satuan. Ketiga, penyampaian kebijakan yaitu Struktur organisasi yang disusun secara sistematis dan hierarkis sekarang sudah sangat menunjang dalam penyampaian kebijakan

²¹ Syauckani, Gaffar, & Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

dari Komando Atas sampai Satuan bawah maupun setiap personel di Satuan.

Selain itu, jika merujuk pada definisi Syukur dalam Surmayadi yang mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:²² Pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Satbravo 90 Paskhas merupakan sebuah program yang dibentuk oleh Mabes AU untuk mengatasi terorisme. Sementara terdapat pula kerjasama gabungan yaitu Koopssus yang menghimpun TNI AU, TNI AD dan TNI AL.

Kedua, target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. Pada Satbravo 90 Paskhas terdapat target grup yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. Terkhusus TNI AU maka Satbravo 90 Paskhas melakukan latihan dan pendidikan sehingga bermanfaat serta dapat digunakan dalam mengatasi terorisme.

Ketiga, unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau

perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Satbravo 90 Paskhas juga bertindak sebagai unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan oleh Mabes AU untuk mengimplementasikan tugas OMSP TNI.

Aksi teror kontemporer, seperti penyanderaan dan serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh satuan-satuan anti teror TNI. Sebagaimana disinggung sebelumnya TNI sudah sejak lama membangun kemampuan anti teror dalam satuan-satuannya. Saat ini, pada setiap angkatan yang ada di dalam tubuh TNI terdapat satuan-satuan yang memiliki kualifikasi anti teror: Satuan Penanggulangan Teror 81 (Satgultor 81) Komando Pasukan Khusus di Angkatan Darat, Komando Pasukan Katak di Angkatan Laut, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) Korps Marinir di Angkatan Laut, dan Satuan Bravo 90 Paskhas di Angkatan Udara. Satuan-satuan ini memang dilatih dan dipersenjatai untuk menghadapi ancaman terorisme terhadap objek strategis terpilih seperti pembajakan pesawat, pembebasan sandera pada objek vital (misalnya

²² Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: CV. Citra Utama, 2005).

kedutaan besar), pembajakan di gedung tinggi, dan seterusnya.

Adapun peneliti membuat tabel pelibatan Satbravo 90 Paskhas dalam mengimplementasikan tugas OMSP TNI di Indonesia.

Tabel 1 Pelibatan Satuan Bravo 90 Paskhas dalam Satuan Tugas Pengamanan dan Penanggulangan Teror

No	Nama Operasi	Jumlah Pesonil	Keterangan
1.	Satgas Pam KTT Bali Democracy Forum di Bali, 2010	20 Org	Pam VVIP/VIP
2	Satgas Pam KTT Bali Democracy Forum di Bali, 2011	20 Org	Pam VVIP/VIP
3	Satgas Pam KTT ASEAN ke 18 di Jakarta, 2011	25 Org	Pam VVIP/VIP
4	Satgas Gultor KTT ASEAN ke 18 di Jakarta, 2011	56 Org	Pam VVIP/VIP
5	Satgas Pam KTT ASEAN ke 19 di Bali, 2011	30 Org	Pam VVIP/VIP
6	Satgas Pam APEC di Bali, 2013	18 Org	Pam VVIP/VIP
7	Satgas Gultor KAA di Bandung, 2015	56 Org	Pam VVIP/VIP
8	Satgas Pam KTT World Islamic Economic Forum di Jakarta, 2016	100 Org	Pam VVIP/VIP
9	Satgas Gultor	70 Org	BKO

KTT World Islamic Economic Forum di Jakarta, 2016

Paspampres 20 Org/
Gultor 50 Org

10	Satgas Pembebasan Sandera Abu Sayyaf di Filipina, 2016	30 Org	Terdiri dari 2 TIM DPP tergabung dalam Satgas Koopsusgab TNI Standby Tarakan.
11	Satgas BKO BAIS TNI, 2018	15 Org	Ops Intel
12	Satgas BKO BNPT, 2018	3 Org	Ops Intel
13	Satgas BIN, 2018	10 Org	Ops Intel

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Setidaknya ada empat bentuk penggunaan militer untuk kontra-terorisme.²³ Pertama, kekuatan militer dapat digunakan untuk membantu Kepolisian maupun aparat keamanan dan ketertiban lain dalam menghadapi skenario terorisme yang telah mengakibatkan hilangnya tertib hukum di kawasan tertentu di dalam negara. Kedua, militer juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan atau *preemption* terhadap kelompok atau sel teroris tertentu sebelum aksinya terlaksana dan korban jatuh. Ketiga, adalah fungsi penggentaran. Keempat, operasi pengeliminasian tokoh-tokoh kunci kelompok terorisme (*targeted killing*)

²³ Isabelle Duyvesteyn, "Great Expectations: The Use of Armed Force to Combat Terrorism," *Small Wars & Insurgencies*, Vol. 19, No. 3, 2008, hlm. 328-351

adalah salah satu bentuk peranan militer yang banyak diilustrasikan oleh literatur kajian terorisme dari Barat dan Israel yang cenderung menekankan efek kelumpuhan organisasi yang diakibatkan oleh akumulasi operasi pengeliminasian tokoh-tokoh kunci pihak lawan.

Jika merujuk Isabelle Duyvesteyn, Satbravo 90 Paskhas telah melaksanakan kegiatan antara lain: pertama untuk membantu Kepolisian dalam hal ini Satbravo 90 Paskhas dilibatkan dalam penugasan melalui Satuan Tugas Penanggulangan Teror (Satgas Gultor) antara lain pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 18 di Jakarta pada tahun 2011 sebanyak 56 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP, pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 2015 sebanyak 56 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP, dan pada KTT *World Islamic Economic Forum* di Jakarta pada tahun 2016 di bawah kendali operasi (BKO) Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebanyak 20 orang dan Penanggulangan Teror sebanyak 50 orang.

Kedua, dalam fungsi pencegahan, Satbravo 90 Paskhas turut terlibat dalam satuan tugas pengamanan KTT *Bali Democracy Forum* di Bali pada tahun 2010 dan 2011 sebanyak 20 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP, satuan tugas

pengamanan KTT ASEAN ke 18 di Jakarta pada tahun 2011 sebanyak 25 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP, satuan tugas pengamanan KTT ASEAN ke 19 di Bali pada tahun 2011 sebanyak 30 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP, satuan tugas pengamanan APEC di Bali pada tahun 2013 sebanyak 18 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP, dan satuan tugas pengamanan KTT *World Islamic Economic Forum* di Jakarta pada tahun 2016 sebanyak 100 orang dalam rangka pengamanan VVIP/VIP.

Ketiga adalah fungsi penggentaran. Untuk melaksanakan fungsi penggentaran Satbravo 90 Paskhas turut mengambil bagian dengan mengirimkan anggotanya sebanyak 3 orang di dalam satuan tugas dibawah kendali operasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada operasi intelijen tahun 2018, terlibat dalam satuan tugas di bawah kendali operasi Badan Intelijen Strategis TNI sebanyak 15 orang pada operasi intelijen tahun 2018, terlibat dalam satuan tugas Badan Intelijen Negara sebanyak 15 pada operasi intelijen tahun 2018, serta satuan tugas lainnya di dalam maupun luar negeri baik terlibat dalam *military operation* maupun *military staff* dalam misi perdamaian PBB. Terakhir, operasi pengeliminasian tokoh-tokoh kunci kelompok terorisme (*targeted killing*)

Satbravo 90 Paskhas dilibatkan dalam Satuan Tugas Pembebasan Sandera Abu Sayyaf di Filipina pada tahun 2016 dengan menerjunkan 2 tim berjumlah 30 orang yang tergabung dalam Satgas Koopssusgab TNI.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Satbravo 90 Paskhas telah melaksanakan kegiatan yang sesuai konsep yang telah dikemukakan oleh Isabelle Duyvesteyn sebagai implementasi tugas OMSP TNI. Peneliti berkesimpulan bahwa, implementasi tugas OMSP TNI yang telah dilaksanakan sudah cukup baik. Namun dapat ditingkatkan jumlah personel yang terlibat agar kedepan diharapkan penggunaan personel Satbravo 90 Paskhas akan meningkatkan kapasitas kemampuan anti teror masing-masing individu.

Sementara, konsep *counter terrorism* menurut Zoran Pavlovic terdapat lima cara dalam *counter-terrorism* yang dapat diimplementasikan oleh Satbravo 90 Paskhas yaitu:²⁴

- a. Penegakan Hukum. Terorisme internasional dan domestik dapat ditanggulangi dengan penegakan hukum yang sesuai. Satbravo 90 Paskhas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang penanggulangan terorisme

yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak terorisme Satbravo 90 Paskhas di laksanakan dengan memperhatikan aturan pelibatan yang sudah dibuat oleh pemerintah berupa Undang-Undang Terorisme dan Doktrin TNI.

- b. Membaca pendanaan terorisme. Aktivitas terorisme yang mahal dan memerlukan penyimpanan dana yang esensial untuk aksinya. Penegakan hukum dan agensi inteligen dapat menggunakan kesempatan untuk mencari jejak keuangan teroris. Satbravo 90 Paskhas dapat membaca pendanaan terorisme dengan kerjasama BAIS dan BIN.
- c. Interpretasi komunikasi. Keuntungan vital dari adanya perang global melawan terorisme adalah kemampuan para anti teroris untuk menginterpretasikan komunikasi tanpa sepengetahuan teroris. Satbravo 90 Paskhas melaksanakan fungsi intelijen secara terbatas. Selain itu Satbravo 90 Paskhas juga melibatkan personel-personel dalam tugas intelijen di BNPT, BIN dan BAIS TNI yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik dalam penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan.

²⁴ Zoran Pavlovic, *Global Connections: Terrorism and Security*, (New York: Infobase Publishing, 2009)

- d. Pengintaian dan pengawasan. Interpretasi komunikasi hanyalah satu aspek anti terorisme. Satbravo 90 Paskhas tidak melaksanakan pengawasan dan pengintaian langsung terhadap terduga teroris. Tugas tersebut sampai saat ini masih dilaksanakan oleh pihak Kepolisian.
- e. Pelatihan dan infiltrasi. Melakukan pelatihan dan infiltrasi ke kelompok terorisme merupakan hal yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan apabila patroli darat telah dilaksanakan. Kemampuan infiltrasi adalah salah satu kemampuan yang dimiliki Satbravo 90 Paskhas. Pelatihan ini dilaksanakan saat menempuh pendidikan intelijen di BAIS TNI maupun di Pusdiklat Paskhas.

Kemudian, konsep interoperabilitas²⁵ yang digunakan dalam menganalisis pelaksanaan tugas OMSP TNI dalam strategi Satbravo 90 Paskhas dengan mendefinisikan cara kerja interoperabilitas yaitu:²⁶

²⁵ Arwin Datumaya, "Meraih Interoperabilitas TNI AU: Sebuah Pendekatan Imiah Sederhana", Angkasa Cendikia, Edisi April 2017.

²⁶ Diallo Saikou, "Understanding Interoperability", Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/220954268>, Januari 2011, diakses pada 28 Oktober 2019

- a. Pertukaran informasi. Sistem interoperabilitas ditandai dengan kemampuannya untuk bertukar informasi. Pertukaran informasi secara dilaksanakan saat ada pelaksanaan latihan gabungan antar matra maupun rapat-rapat tentang pembahasan terorisme yang melibatkan pasukan khusus tiap-tiap matra.
- b. Kegunaan dari informasi. Aspek lain yang ditekankan dalam definisi ini adalah gagasan tentang kegunaan atau kegunaan informasi yang dipertukarkan. Informasi tersebut berguna sebagai pengetahuan dan dasar dalam pelaksanaan operasi, selain itu sebagai pemacu dalam penyiapan satuan untuk menghadapi terorisme. Cara terbaik untuk mendapatkan informasi tersebut dengan dialog langsung baik dalam latihan gabungan maupun rapat bersama yang diadakan antar matra.
- Selain itu, dalam konsep interoperabilitas yang dapat mendukung penelitian ini adalah kerjasama dan penggunaan Alutsista bersama. Kerjasama dengan matra lain berupa pelaksanaan latihan gabungan maupun koordinasi dalam rangka mendukung latihan masing-masing matra baik penggunaan fasilitas latihan

maupun alat peralatan. Sementara, penggunaan Alutsista dalam hal ini jika dilaksanakan secara gabungan berarti dilaksanakan secara terinteroperability dan saling mendukung. Sejauh ini Alutsista Satbravo 90 Paskhas yang berupa kendaraan maupun persenjataan sudah memenuhi standart yang diperlukan oleh Satuan Khusus.

Konsep lainnya yang digunakan untuk menganalisis adalah konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI. Amanat Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 mengenai mengatasi aksi terorisme sebagai tugas operasi militer selain perang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi aksi terorisme. Dalam menghadapi aksi terorisme ada faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan, antara lain:

1) Kekuatan dan kemampuan teroris.

Cara menganalisis kemampuan dan perkembangan terorisme dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkini terkait kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dan kejadian sudah lama terjadi sekalipun, dari situ dapat dikaitkan rantai komando dan hubungan organisasi pelaku teroris tersebut. Memetakan

dan mendeteksi perilaku bagi orang awam tentu tidak serta merta bisa dikuasai tanpa pelatihan, kelak setelah pelatihan petugas keamanan akan mampu membedakan bagaimana perilaku orang yang punya masalah pribadi dengan yang punya kebencian dari tindak-tanduknya (gelisah atau berkeringat karena masalah psikis dengan gugup akan melakukan aksi bisa dibedakan). Memahami pola pikir teroris berguna untuk memetakan perilaku teroris. Jika tidak mengerti pola pikir teroris, tidak akan bisa mengetahui indikator profil seorang teroris. *Body language* atau bahasa tubuh tidak bisa menipu.

2) Operasi dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Satbravo 90 Paskhas merupakan Satuan TNI yang berdiri untuk menjaga keutuhan NKRI sehingga keputusan Politik apapun dari Pemerintah merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Satu hal yang pasti yaitu Koopssus TNI akan bertindak jika ada perintah langsung dari Panglima TNI yang tentunya atas keputusan Presiden dan lembaga terkait.

3) Operasi dilaksanakan secara terpadu. Penggunaan kekuatan Satbravo 90

Paskhas berada di bawah Panglima TNI dan operasi yang dilaksanakan akan selalu merupakan operasi terpadu yang melibatkan satuan khusus matra lain, terkecuali ada perintah khusus yang merupakan spesialisasi Satbravo 90 Paskhas. Operasi terpadu merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena penanganan dan pelaksanaan operasi khusus melibatkan banyak satuan dan unsur pendukung didalamnya, Koopssus TNI akan sulit bergerak dilapangan tanpa dukungan dari satuan/unsur/instansi lainnya.

- 4) Kondisi objektif yang berlaku di tengah masyarakat. Secara umum situasi saat ini kondusif akan tetapi Koopssus TNI setiap saat selalu siap jika dibutuhkan dan perintahkan dalam penanganan tindak terorisisme dan operasi khusus yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tanggapan masyarakat atau aparat lainnya tentang Koopssus TNI atas pelaksanaan operasi yang sedang dilaksanakan tidak ada masalah. Setiap operasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Secara obyektif situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia cukup

kondusif hanya di beberapa wilayah seperti Papua yang masih ada gejolak namun tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia, Koopssus TNI merupakan Badan Pelaksana Pusat Markas Besar TNI berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan operasi khusus terhadap sasaran strategis terpilih dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dalam melaksanakan tugas Koopssus TNI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penangkal, yaitu kekuatan Koopssus TNI harus mampu mewujudkan daya tangkal terhadap ancaman yang bersifat khusus, kekuatan dan kemampuan secara nyata berdampak psikologis dan diperhitungkan lawan sehingga mengurungkan dan mencegah niat lawan untuk melakukan aksinya.

- b. Penindak, yaitu kekuatan Koopssus TNI mampu digerakkan dalam melaksanakan penindakan terhadap lawan dengan tingkat keberhasilan tinggi berdasarkan tugas khusus dan strategis terpilih yang diberikan oleh Panglima.
- c. Pemulih, yaitu kekuatan Koopssus TNI mampu untuk memulihkan keadaan baik secara psikis maupun fisik terhadap dampak yang ditimbulkan oleh lawan setelah penindakan yang dilaksanakan.

Kemudian terorisme adalah sebuah aktivitas, metode khusus pemberontakan bersenjata atau, mengutip Brian Jenkins, sistem senjata (*weapon-system*) yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk pemerintah dan aktor non-negara.²⁷ Aksi terorisme, dengan demikian, dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari kampanye bersenjata yang lebih luas. Jika terorisme dilihat sebagai sebuah metode alih-alih filosofi atau gerakan itu sendiri, maka TNI dapat dikatakan sepanjang sejarahnya telah menjalankan peran aktif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dari tinjauan sejarah singkat mengenai pola ancaman terorisme di Indonesia dan respon negara dalam bentuk penggunaan kekuatan TNI dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan militer telah sejak lama menjadi bagian dari pendekatan penanggulangan terorisme di Indonesia. Pada masa sebelum Reformasi aksi terorisme banyak digunakan sebagai bagian dari kampanye insurgensi dan disintegrasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok. Ancaman terorisme pada masa itu, dengan demikian, lebih melekat pada bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara sehingga memberi legitimasi yang kuat bagi TNI untuk mendominasi upaya penanggulangan terorisme.

Strategi Satbravo 90 Paskhas dalam Mengatasi Terorisme

Dalam membahas strategi Satbravo 90 dalam mengatasi terorisme, peneliti menggunakan konsep strategi dan interoperabilitas. Konsep strategi akan digunakan untuk membahas strategi secara umum sementara konsep interoperabilitas digunakan untuk membahas kemampuan dari sistem, peralatan, organisasi atau aturan yang dapat dioperasikan antar satu dengan yang lainnya.

²⁷ Paul Wilkinson, *Terrorism versus Democracy: The Liberal State Response*, (New York: Routledge, 2011), hlm. 6.

Dalam mengaplikasikan strategi, peneliti menggunakan teori milik Arthur F. Lykke Jr. dalam *U.S. Army War College Guide to Strategy*. Lykke menjabarkan bahwa strategi terdiri dari tiga elemen yaitu *Ends*, *Ways*, dan *Means* yang dapat dijadikan dasar rumus untuk segala macam strategi baik dalam dunia militer, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, tergantung dari elemen kekuatan nasional yang digunakan.²⁸ Penjabaran dari elemen-elemen tersebut adalah:

- a. *Ends*, merupakan tujuan, visi dan misi atau objek yang akan dicapai dimana membutuhkan kejelasan dan analisis yang tepat sehingga dapat menentukan penggunaan *ways* dan *means* yang efektif dan efisien. Tujuan dibentuknya Satbravo 90 adalah menciptakan satuan khusus TNI yang profesional dan siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan dalam mengatasi terorisme.
- b. *Ways*, merupakan cara, jalan ataupun sebuah konsep operasi yang digunakan dalam mewujudkan *ends* atau tujuan yang telah ditetapkan yang sangat memungkinkan dan mampu untuk dijalankan sesuai

dengan konsep operasi yang mempertimbangkan *means* atau sumber daya yang tersedia. Dalam melaksanakan operasinya, demi mencapai tujuan Satbravo 90 melakukan beberapa hal seperti menyiapkan personel yang terbaik mulai dari proses seleksi, pembinaan serta peningkatan kesejahteraan personel tersebut. Pola pembinaan latihan yang berorientasi pada pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Baik secara individu maupun Satuan. Melengkapai Fasilitas latihan, persenjataan dan perlengkapan sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

- c. *Means*, merupakan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mewujudkan *ends* atau tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan *ways* atau konsep operasi yang digunakan. Sumber daya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam implementasi strategi Satbravo 90. Penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi yang ditetapkan yaitu secara struktural, Koopssus TNI berada di bawah komando Panglima TNI. Panglima TNI dapat segera

²⁸ Arthur Lykke, *Military Strategy: Theory and Application*, (Pennsylvania: U.S. Army War College, 2010), hlm. 13

menggerakkan pasukan tersebut dengan cepat apabila dibutuhkan. Yang mana personil Koopssus terdiri dari Kurang lebih 300 personel untuk menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan dari aksi terorisme.

Kemudian, hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menanggulangi terorisme ialah dengan sebuah strategi untuk menentukan prioritas dan fokus untuk menggunakan sumber daya suatu negara baik sumber daya yang berupa uang, waktu, maupun modal. Termasuk juga sumber daya politik dan kekuatan militer negara tersebut.²⁹ Hal ini patut disesuaikan dengan kekuatan militer yang menanggulangi ancaman teror pada aspek udara seperti Satbravo 90 Paskhas. Dengan menentukan skala prioritas pembangunan kekuatan Satbravo 90 Paskhas akan lebih menentukan aspek stabilitas keamanan pada objek vital udara maupun serangan teror yang menggunakan teknologi udara.

Ditambah lagi, Negara yang sedang berusaha untuk mengatasi ancaman teror harus memperbesar kapabilitas diplomasi

dan pertahanan negaranya karena kedua faktor tersebut berperan besar dalam upaya kontra teror. Melalui skala prioritas atas penggunaan sumber daya negara maka negara tersebut akan lebih berhemat tenaga daripada melawan teror dengan perang yang menguras tenaga (*attrition war*). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap Satbravo 90 Paskhas guna menjalani kerjasama kontra teror aspek udara dengan negara yang memiliki lisensi dan kualifikasi khusus terhadap hal tersebut. Kerjasama satuan teror antar negara diperlukan guna adanya transfer of knowledge terhadap pola dan ancaman terbaru yang dihadapi negara-negara saat ini.

Demikian juga dengan melakukan peningkatan kemampuan personel Satbravo 90 Paskhas yang dapat dilakukan seperti penambahan jumlah personil dan Alutsista, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih maupun peningkatan kemampuan personil dalam bidang kontra teror baik melalui latihan bersama maupun dengan mengadakan konferensi agar dapat bertukar pengalaman dengan negara lain. Peningkatan kapabilitas intelijen juga merupakan salah satu poin terpenting karena dengan intelijen yang baik maka negara akan memiliki “mata” dan

²⁹ Berry Posen. “The Struggle Against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics”. *International Security*. Vol. 26, No. 3, 2001, hlm. 39-55.

telinga” terhadap ancaman suatu aksi teror, sehingga negara mampu melakukan penangkalan sebelum serangan teror itu dilakukan. Intelijen harus mampu mengkonsentrasikan semua informasi yang berguna di dalam satu wadah.

Sementara itu, konsep interoperabilitas merupakan sebuah kondisi yang dicapai antara sistem komunikasi elektronik atau peralatan komunikasi elektronik ketika informasi atau layanan dapat dipertukarkan secara langsung dan memuaskan antara penggunanya. Terdapat dua hal yang dapat mendefinisikan cara kerja interoperabilitas yaitu:³⁰

- a. Pertukaran informasi. Sistem konsep interoperabilitas ditandai dengan kemampuannya untuk bertukar informasi. Sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya, Departemen pertahanan Amerika Serikat menekankan fakta bahwa pertukaran informasi harus langsung dan sesuai dengan apa yang digambarkan. Sistem interoperable ditandai oleh kemampuannya untuk bertukar informasi. Definisi DoD menekankan fakta bahwa pertukaran informasi harus langsung yang sesuai dengan pandangan yang digambarkan pada gambar satu. Interoperabilitas

berada pada level sistem dan lebih tepatnya sistem yang diimplementasikan pada komputer. Definisi ini juga mengambil posisi bahwa interoperabilitas adalah suatu kondisi yang harus dicapai yang menyiratkan bahwa sistem saling beroperasi ketika mereka interoperable. Dalam penelitian ini pertukaran informasi secara terbatas dilaksanakan saat ada pelaksanaan latihan gabungan maupun rapat-rapat tentang pembahasan terorisme.

- b. Kegunaan dari informasi. Aspek lain yang ditekankan dalam definisi ini adalah gagasan tentang kegunaan atau kegunaan informasi yang dipertukarkan. Pertanyaan alami yang muncul segera adalah siapa yang menentukan apa yang berguna dan penentuan ini dilakukan sebelum, selama atau setelah pertukaran informasi. Ini juga menunjuk pada fakta bahwa ada arah arus informasi dan penting untuk mengidentifikasinya selama interoperasi. Kegunaan informasi tersebut sebagai pengetahuan dan dasar dalam pelaksanaan operasi, selain itu sebagai pemacu dalam penyiapan satuan untuk menghadapi terorisme. Cara terbaik untuk

³⁰ Diallo Saikou, *Loc.Cit.*

mendapatkan informasi tersebut dengan dialog langsung baik dalam Latihan gabungan maupun Rapat bersama.

Selain itu, kerjasama antar matra dan penggunaan alutsista merupakan bagian konsep interoperabilitas yang penting untuk dibahas. Kerjasama dengan matra lain berupa pelaksanaan latihan gabungan maupun koordinasi dalam rangka mendukung latihan masing-masing matra baik penggunaan fasilitas latihan maupun alat peralatan. Sementara penggunaan Alutsista dalam hal ini jika dilaksanakan secara gabungan berarti dilaksanakan secara terinteroperability dan saling mendukung. Sejauh ini Alutsista Satbravo 90 Paskhas yang berupa persenjataan, alat komunikasi, alat peralatan khusus, alat optik maupun kendaraan bermotor sudah memenuhi standar yang diperlukan oleh Satuan Khusus sesuai dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Paskhas Daftar Susunan Personel (DSP) Satbravo 90 Paskhas.

Apabila dikaitkan dengan implementasi, sumber daya dan penyampaian kebijakan maka konsep interoperabilitas dapat dikaji yaitu Satbravo 90 Paskhas sudah memiliki aturan lanjutan

berupa petunjuk teknis maupun prosedur tetap yang dibuat sebagai rambu ataupun acuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan Komando Atas. Sementara sumber daya dikaitkan dengan penyiapan sumber daya dilakukan dengan latihan rutin, bertahap, bertingkat dan berlanjut termasuk sarana prasarana yang menunjang terus diajukan dan dibangun guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh Satuan. Terkhusus dengan penyampaian kebijakan maka struktur organisasi yang disusun secara sistematis dan hierarkis sekarang sudah sangat menunjang dalam penyampaian kebijakan dari Komando Atas sampai Satuan bawah maupun setiap personel di Satuan.

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Satbravo 90 Paskhas untuk menanggulangi masalah terorisme sudah seharusnya semakin ditingkatkan. Beberapa sumber daya tersebut ialah sumber daya finansial negara, modal kekuatan politik khususnya politik masyarakat, kapasitas organisasi anti terorisme serta perangkat regulasi yang mengatur tentang penanganan terorisme di Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat ancaman terorisme terlebih lagi dengan penggunaan drone semakin marak dilakukan.

Adapun contoh kasus penggunaan drone yang menyita perhatian dunia pada

umumnya dan Indonesia khususnya adalah kasus serangan pabrik minyak Aramco di Saudi Arabia pada tahun 2019.³¹ Selain itu, serangan di Irak terhadap Jenderal Qassem Soleimani pada awal tahun 2020. Berdasarkan kedua kasus tersebut dapat dilihat bahwa ancaman teror udara sangat membahayakan dan memiliki daya hancur dengan ketepatan nyaris sempurna (Pratnyawan & Rachmanta, 2020). Berkaca terhadap kasus tersebut maka diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap obyek vital nasional maupun pengamanan terhadap VVIP/VIP dari serangan teror yang menggunakan wahana udara. Oleh karena itu, ancaman teror tersebut seharusnya menjadi efek penggentar bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara khususnya terkait terorisme aspek udara.

Bila kita melihat bagaimana negara-negara besar mempersiapkan sumber daya yang cukup besar bagi penanggulangan teroris, Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap ancaman terorisme juga perlu mempersiapkan sumber daya yang khusus bagi penanggulangan terorisme ini. Meskipun ancaman serangan udara yang menggunakan teknologi tersebut belum menjadi ancaman aktual di Indonesia, diharapkan dengan adanya peningkatan

sumber daya yang dilakukan pemerintah dapat memperbaiki kinerja unit anti teror, terutama yang terkait dengan bidang pencegahan aksi teror dalam melakukan pendeteksian dini maupun program pelatihan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan terhadap rumusan masalah, maka peneliti menarik kesimpulan umum dari penelitian Strategi Satuan Bravo 90 Paskhas Dalam Mengatasi Terorisme yakni dengan menggunakan strategi dan implementasi interoperabilitas.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengolahan data yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Dalam hal implementasi tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI, Satbravo 90 Paskhas menjalankan tugas yang sudah disusun, direncanakan dan di koordinasikan oleh Komando Operasi Khusus (Koopssus TNI). Koopssus TNI mengkoordinasikan seluruh satuan khusus di TNI AU, AD, dan AL guna menjalankan operasi seperti Separatisme, dan Terorisme. Implementasi tugas tersebut juga atas perintah dari Panglima TNI sebagai

³¹ David Reid, *Loc.Cit.*

pemegang komando utama sehingga Satbravo 90 Paskhas siap menjalankan tugas sesuai arah, sasaran, target yang telah ditentukan oleh Komando Atas. Selain itu, dilakukan juga konsep interoperabilitas yang diimplementasikan dengan cara latihan gabungan secara berkala dengan menggunakan Alutsista yang dimiliki oleh tiap-tiap satuan dengan teknologi terkini sesuai dengan perkembangan jaman serta *sharing* informasi dalam operasi intelijen. Dengan memanfaatkan hasil *sharing* informasi ini Satbravo 90 Paskhas dapat menganalisis ancaman terbaru sehingga dapat ditangani dengan efektif dan efisien, selain itu juga dilakukan rekayasa Alutsista yang dimiliki agar dapat digunakan dalam melaksanakan operasi dan simulasi penanggulangan teror.

- b. Strategi Satuan Bravo 90 Paskhas dilakukan dengan mengidentifikasi *ends, means dan way* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan. *Ends* Satbravo 90 Paskhas agar menjadi satuan penanggulangan anti teror yang profesional dan tangguh dalam mengatasi terorisme aspek udara di Indonesia. Tujuan yang ingin

dicapai dari strategi Satbravo 90 Paskhas yaitu untuk menyelenggarakan operasi khusus anti teror dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan operasi khusus anti teror yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. *Means* yaitu dengan penggunaan kualitas sumber daya manusia serta alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki yang dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan ancaman teror terkini yang berfokus pada aspek udara. Selain itu, penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi yang ditetapkan yaitu secara struktural, Satbravo 90 Paskhas berada di bawah komando Panglima TNI. Harapannya, Panglima TNI dapat segera menggerakkan pasukan tersebut dengan cepat apabila dibutuhkan. Yang mana personil Satbravo 90 Paskhas terdiri dari kurang lebih 250 personel untuk menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan dari aksi terorisme aspek udara. *Ways* Satbravo

90 Paskhas digunakan dengan cara menyiapkan personel Paskhas yang terbaik mulai dari proses seleksi, pembinaan serta peningkatan kemampuan dan kesejahteraan serta melengkapi fasilitas latihan, persenjataan dan perlengkapan. Selanjutnya Satbravo juga berkoordinasi ke satuan penanggulangan teror dari matra lainnya seperti Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus, Detasemen Jala Mangkara Marinir, dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk memutakhirkan informasi tentang bentuk dan pola ancaman terbaru dari terorisme. Selain itu, tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan strategi tersebut yaitu dengan adanya latihan gabungan guna peningkatan kemampuan dan kualitas personel di BNPT Sentul untuk menambah kemampuan.

Sementara peneliti memberikan rekomendasi teoritis dan praktis. Secara teoritis Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan optimalisasi penggunaan Satbravo 90 Paskhas dalam Koopssus TNI khususnya dalam penanggulangan ancaman teror pada aspek udara. Dengan adanya Undang-Undang No 5 Tentang Tindak Pidana Terorisme bahwa

keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme menjadi hal yang mutlak sebagai bentuk sinergitas antar Kementerian/Lembaga. Sehingga kajian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) Satbravo 90 Paskhas dalam mengatasi terorisme aspek udara.

Selain itu, diperlukan adanya kajian yang integratif antara bidang kajian asimetris seperti halnya aktivitas terorisme, kejahatan transnasional, dan kajian terhadap penggunaan kekuatan udara (*Air Power*), mengingat telah muncul berbagai bentuk ancaman baru yang bersifat asimetris yang terkait langsung dengan hubungan lintas negara. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema dan fokus penelitian yang berbeda maupun serupa demi kemajuan bidang Pendidikan.

Secara khusus untuk Universitas Pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tambahan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal penanggulangan ancaman asimetris secara komprehensif. Khususnya dalam hal terorisme; kejahatan penggunaan *drone*. Lokus penelitian pun objek vital nasional aspek udara demi

mengetahui dan membuktikan bahwa Indonesia melaksanakan tujuan negara dalam menjaga kestabilan keamanan udara dan ruang udara nasional dari aksi terorisme.

Secara praktis, peneliti merekomendasikan beberapa hal agar strategi Satbravo 90 Paskhas dapat berjalan lebih efisien dan efektif demi menjaga keamanan ruang udara nasional dari aksi terorisme. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan sinergitas antara Koopssus TNI dan Densus 88 AT Polri dirasa penting guna menghindari tumpang tindih tugas serta ego sektoral ketika menghadapi kesiapsiagaan dalam penanggulangan terorisme.
- b. Memutakhirkan sarana dan prasarana ataupun Alutsista yang berkaitan dengan ancaman aspek udara.
- c. Kementerian Pertahanan meningkatkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan melalui kerja sama dengan BPPT, LAPAN dan kementerian/lembaga yang terkait lainnya guna memajukan industri pertahanan udara.
- d. Koopssus TNI penting melakukan pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kemampuan satuan

penanggulangan teror masing-masing mata.

- e. Satbravo 90 Paskhas perlu meningkatkan kerjasama luar negeri kontra teror aspek udara serta pengiriman personel untuk sekolah kontra teror di negara-negara maju.

Daftar Pustaka

Buku

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta
- Lykke, Arthur. (2010) *Military Strategy: Theory and Application*. Pennsylvania: U.S. Army War College.
- Paskhas, B. (2018). *Satuan Bravo 90 Paskhas Catya Wihikan Awacya Makapala*. Jakarta: Satuan Bravo 90 Pashkas.
- Pavlovic, Z. (2009). *Global Connections: Terrorism and Security*. Infobase Publishing: New York Chelsea House.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Sutiyono. (2011). *Fenomenologi Seni Meneropong Fenomena Sosial dalam Kesenian*. Yogyakarta: Insan Persada.
- Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, R. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wilkinson, Paul. (2011), *Terrorism Versus Democracy*. London: Taylor and Francis Group.

Jurnal

Datumaya, A. (2017). "Meraih Interopabilitas TNI AU: Sebuah Pendekatan Ilmiah Sederhana". *Angkasa Cendekia*, Edisi April 2017.

Duyvestyen, I. (2008). "Great Expectations: The Use of Armed Force to Combat Terrorism". *Small Wars & Insurgencies*, Vol. 19 (3), pp. 328-351.

Posen, B. (2001). "The Struggle Against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics". *International Security*. Vol. 26 (3), pp. 39-55.

Dokumen dan Undang – Undang

Perkasau. (2013). Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Paskhas

TNI-AD, M. (2017). TOR Akademis FGD Optimalisasi Peran TNI AD Guna Mengatasi Aksi Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Jakarta: Mabes TNI-AD.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Website

Aziz, O. "The World 9/11 Took From Us". Retrieved from [https://www.nytimes.com/2019/09/11/opinion/september11-attacks-](https://www.nytimes.com/2019/09/11/opinion/september11-attacks-2001.html)

[2001.html](https://www.nytimes.com/2019/09/11/opinion/september11-attacks-2001.html), diakses pada 1 Oktober 2019

Hakim, C. "Kedaulatan Negara Di Udara-Krisis Nasionalisme". Retrieved from <http://www.chappyhakim.com/kedaulatan-negara-di-udara-krisis-nasionalisme/>, diakses pada 1 Oktober 2019

Pambudi, J. "Satuan Bravo'90 Paskhas Simulasi Terorisme di Bandara Husein Sastranegara" Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/05/satuan-bravo-90-paskhas-simulasi-terorisme-di-bandara-husein-sastranegara>, diakses pada 1 Oktober 2019

Reid, D. "Saudi Aramco Reveals Attack Damage at Oil Production Plants" Retrieved from CNBC: <https://www.cnbc.com/2019/09/20/oil-drone-attack-damage-revealed-at-saudi-aramco-facility.html>, diakses pada 1 Oktober 2019

Saikou, D. "Understanding Interoperability". Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/220954268>, diakses pada 28 Oktober 2019

Yulianingsih, T. "Pembajakan Pesawat Garuda di Thailand dan Aksi Heroik Pasukan Elite TNI". Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/3927589/28-3-1981-pembajakan-pesawat-garuda-di-thailand-dan-aksi-heroik-pasukan-elite-tni>, diakses pada 28 Oktober 2019